



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 - <http://www.wantannas.go.id>
Telepon (021) 3451066, Faksimile (021) 3451066

Nomor : Und- 264 /PI.04.02/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua lembar
Perihal : Undangan

Jakarta, 17 Desember 2021

Yth. Daftar Nama Pejabat Terlampir

di
Tempat

1. Dasar:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- c. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- d. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah; dan
- e. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-052.01.1.427975/2021 Revisi ke-07 tanggal 29 November 2021.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dimohon hadir dalam Rapat Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Setjen Wantannas TA 2021, yang akan dilaksanakan pada:

- a. Hari, tanggal : Selasa, 21 Desember 2021;
- b. Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai;
- c. Tempat : Ruang Wawasan Nusantara Lt. 5 Gd. A, Setjen Wantannas, Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat; dan
- d. Pimpinan : Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I., Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal.

3. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Dewan Ketahanan Nasional RI
a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Umum,



Supendi, S.T., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI

Tembusan:

1. Sesjen Wantannas (sebagai laporan);
2. Para Kepala Biro;
3. Kabag Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum.

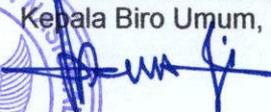
**DAFTAR NAMA PESERTA RAPAT
SOSIALISASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI SETJEN WANTANNAS TA 2021
TANGGAL 21 DESEMBER 2021**

1. Dra. Sri Rahayu Purwaningtyastuti, Pembina Utama Muda / IV.c,
Analisis Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam, Desisnas;
2. Kolonel Laut (KH) Dr. Dwi Ari Purwanto, S.Pd., M.Pd.,
Analisis Kebijakan Bidang Pengembangan Hukum, Debang;
3. Dra. Sri Haryani, M.M., Pembina Utama Muda / IV.c,
Analisis Kebijakan Bidang Ekonomi Nasional, Dejiandra;
4. Kolonel Laut (KH) Fenny Akwan, S.H., M.H.,
Analisis Kebijakan Bidang Rencana Kontinjensi Sosial Budaya, Depolstra;
5. Titin Mardyaningsih, S.E., M.M., Pembina / IV.a,
Auditor Ahli Madya selaku Koor Pok Pengawasan Internal Biro PSP;
6. Kolonel Laut (S) Abdul Rozaq, S.T., M.Tr.Hanla., M.M.,
Kepala Bagian Perencanaan Biro POK;
7. Tri Hariyadi, S.Sos, M.A.P., Pembina / IV.a,
Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koor Pok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK;
8. Imam Supriyadi, S.E., Pembina / IV.a,
Analisis Kepegawaian Ahli Madya selaku Koor Pok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum;
9. Yadi Kurniawanto, S.T., Pembina / IV.a,
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya selaku Koor Pok Keuangan Biro POK;
10. Letkol Arh Abdul Cholik, S.H., M.H.,
Kepala Bagian Persidangan dan Humas Biro PSP;
11. Nurman Kahar, S.IP., M.A.P., Penata Tk. I / III.d,
Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum;
12. Dian Ayu Pertiwi, S.E., Penata Muda / III.a,
Auditor Ahli Pertama Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP;
13. Andre Pamungkas, S.E., Penata Muda / III.a,
Analisis Keuangan Kelompok Keuangan Biro POK;
14. Bayu Prawiradisma Siregar, S.E., Penata Muda / III.a,
Analisis Rencana Program dan Kegiatan Kelompok Perencanaan Biro POK;
15. Alvin Rayinda Pramasha, S.E., Penata Muda / III.a,
Analisis Laporan Hasil Pengawasan Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP;
16. Afifah Fitriani, S.E., Penata Muda / III.a,
Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelompok Perencanaan Biro POK;
17. Karina Dewi, S.H., Penata Muda / III.a,
Analisis Hukum Kelompok Kepegawaian dan Hukum Biro Umum;
18. Daniel Maruli Tua Manik, S.E., Penata Muda / III.a,
Auditor Ahli Pertama Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP;
19. Helfrida Sinaga, S.E., Penata Muda / III.a,
Auditor Ahli Pertama Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP;
20. Maulidya Nurisya, S.E., Penata Muda / III.a,
Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kelompok Ortala Biro POK;

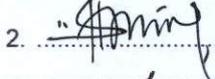
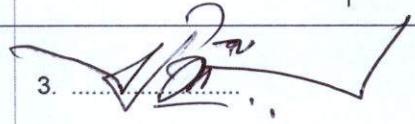
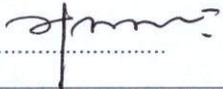
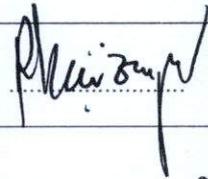
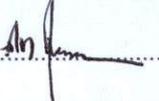
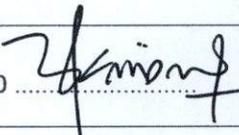
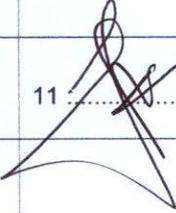
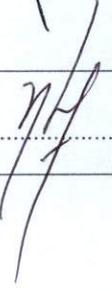
21. Riedjanti Restu Biandari, S.E., Penata Muda / III.a,
Analisis Laporan Hasil Pengawasan Kelompok Pengawasan Internal Biro PSP;
22. Natalina Pakpahan, S.IKom., Penata Muda / III.a,
Analisis Publikasi Kelompok Persidangan dan Humas Biro PSP;
23. Guspahri Ardiansyah Hasibuan, A.Md., Pengatur / II.c,
Pengelola Keamanan Sistem Informasi Kelompok Sisfo Biro PSP.

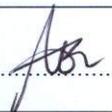
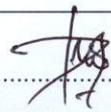
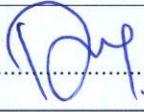
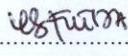
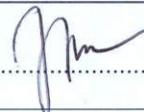
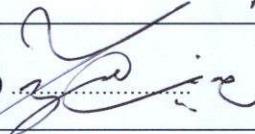
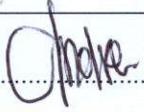
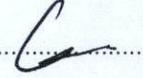
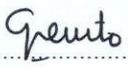


Dewan Ketahanan Nasional RI
a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Umum,

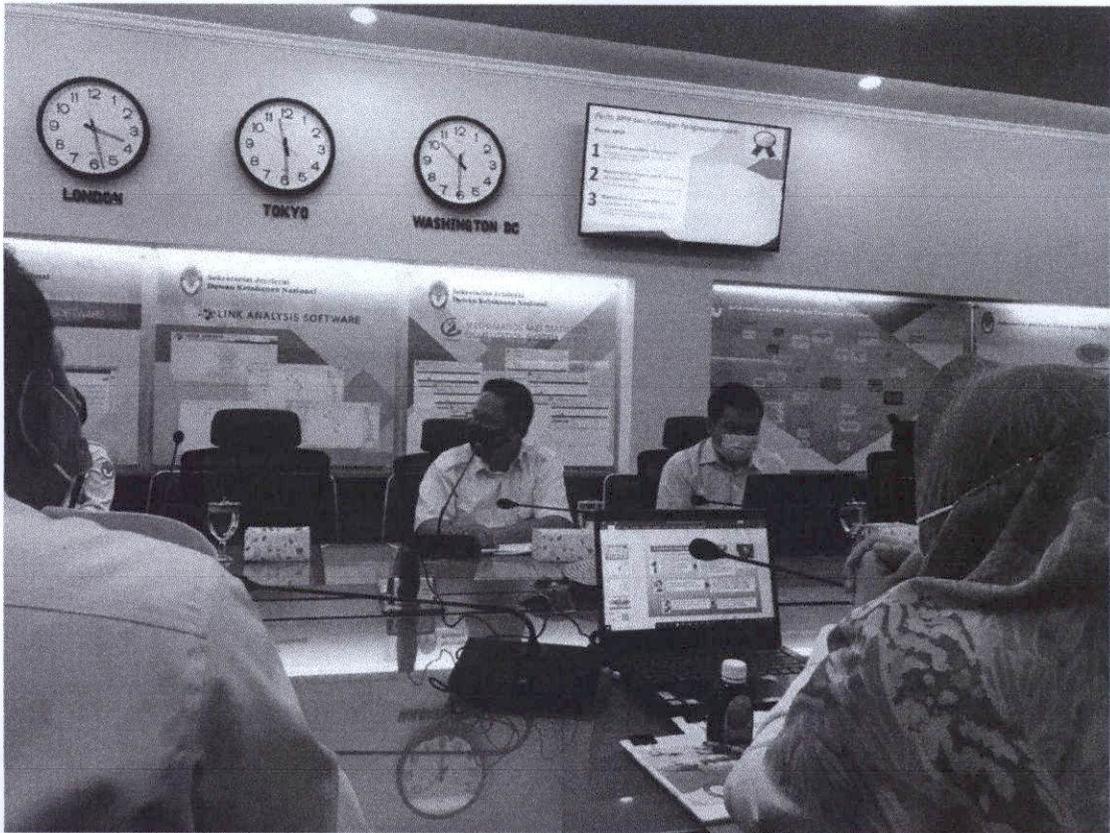

Supendi, S.T., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI

DAFTAR HADIR
RAPAT SOSIALISASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI
SETJEN WANTANNAS TA 2021
SELASA, 21 DESEMBER 2021

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I. ✓	1. 
2	Dra. Sri Rahayu Purwaningtyastuti ✓	2. 
3	Kolonel Laut (KH) Dr. Dwi Ari Purwanto, S.Pd., M.Pd. ✓	3. 
4	Kolonel Laut (KH) Fenny Akwan, S.H., M.H.	4. 
5	Dra. Sri Haryani, M.M. ✓	5. 
6	Titin Mardyaningsih, SE, MM	6. 
7	Kolonel Laut (S) Abdul Rozaq, S.T., M.Tr.Hanla., M.M ✓	7. 
8	Tri Hariyadi, S.Sos., M.A.P. ✓ <i>Jumadi</i>	8. 
9	Imam Supriyadi, S.E.	9. 
10	Yadi Kurniawanto, S.T. ✓	10. 
11	Letkol Arh Abdul Cholik, S.H., M.H.	11. 
12.	Nurman Kahar, S.IP., M.A.P.	12. 

13.	Alvin Rayinda Pramasha, S.E.	13 
14	Dian Ayu Pertiwi, SE	14 
15	Daniel Maruli Tua Manik, SE	15 
16	Helfrida Sinaga, S.E.	16 
17	Riedjanti Restu Biandari, SE	17 
18	Maulidya Nurisya, S.E.	18 
19	Affiah Fitriani, S.E.	19 
20	Karina Dewi, S.H.	20 
21	Natalina Pakpahan, S.I.Kom.	21 
22	Bayu Prawiradisma Siregar, S.E	22 
23	Andre Pamungkas, S.E. ✓	23 
24	Guspahri Ardiansyah Hasibuan, A.Md.	24 
25	Genanto ✓	25 
26		26
27		27
28		28

29		29
30		30
31		31





Penilaian
MATURITAS SPIP
TERINTEGRASI

HENRY MARVIN, AK., M.ACC, C.A.
KOORDINATOR PENGAWASAN BIDANG PERTAHANAN
BPKP

THE PROCESS OF
INTERNAL CONTROL
Control Environment
Identifikasi & Komunikasi

3 Arahan Presiden kepada BPKP dan APIP

pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021



Pengawasan APIP untuk menjamin tercapainya Program Pembangunan Pemerintah yang akuntabel, efektif, dan efisien
27 Mei 2021

- 1** Meningkatkan pengawasan dalam rangka percepatan belanja Pemerintah.

 - Mengidentifikasi permasalahan yang menghambat realisasi belanja pemerintah
 - Mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul
- 2** Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.

 - Program harus memiliki tolak ukur yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat
 - Perencanaan Program harus adaptif dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini
- 3** Meningkatkan pengawasan atas kualitas data yang dikelola oleh Pemerintah

 - Integrasi dan sinkronisasi basis data antar program pemerintah
 - Peningkatan keandalan data

Peran APIP dan Tantangan Pengawasan Intern

Kebanggaan sebagai Auditor



Peran APIP

- 1 Memberikan keyakinan yang memadai**
atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi;
- 2 Memberikan peringatan dini & efektivitas manajemen risiko**
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 3 Memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola → G, R, C**
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern)



3 TANTANGAN UTAMA YANG DIHADAPI APIP dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan.

- 1 Kompetensi dan kapasitas aparat pengawasan baik dari sisi kualitas dan kuantitas**
- 2 Alokasi anggaran pemerintah untuk pengawasan internal yang masih minim**
- 3 Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.**
dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan pengawasan

Ka BPKP, M. Yusuf Ateh, dikemukakan dalam Pelatihan CGCAE Angkatan II, 2 Feb 2021.



Jokowi:
"Jangan Main-main dengan Akuntabilitas Anggaran"
"Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Kita semuanya harus lebih proaktif. Jangan menunggu terjadinya masalah"
(Jakarta, Beritasatu.com, 15 Juni 2020)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020 - 2024

Penerapan Manajemen Risiko pada KLD

Tusi BPKP >> PP 60/2008, Psl. 59
BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP pada KLD



ARAHAN KEPALA BPKP

- "Penerapan SPIP harus dimulai dari tujuan yang ingin dicapai bukan berangkat dari unsur dan sub unsur"
- "Pengukuran harus menitik beratkan pada efektifitas dan perbaikan/penguatan pengendalian intern"

URGENSI

PERBAIKAN STRATEGI PEMBINAAN DAN PENILAIAN MATURITAS SPIP

PENILAIAN DAN PEMBINAAN DIKAITKAN SECARA LANGSUNG DENGAN 4 TUJUAN SPIP

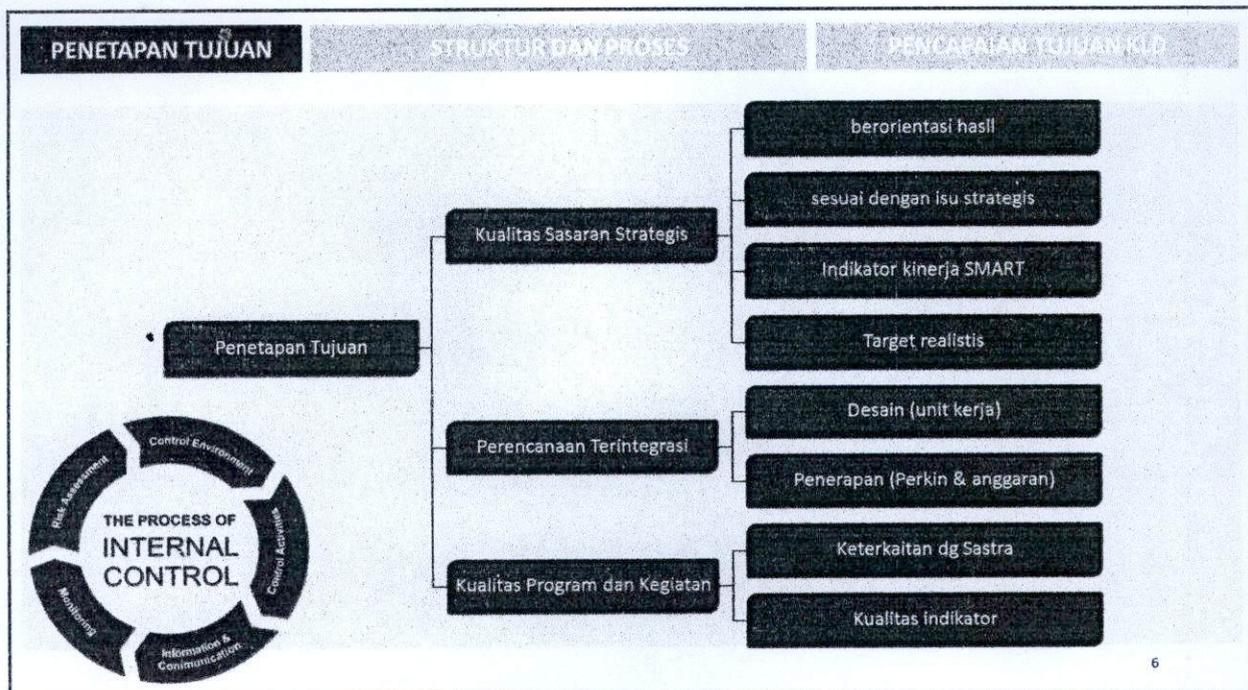
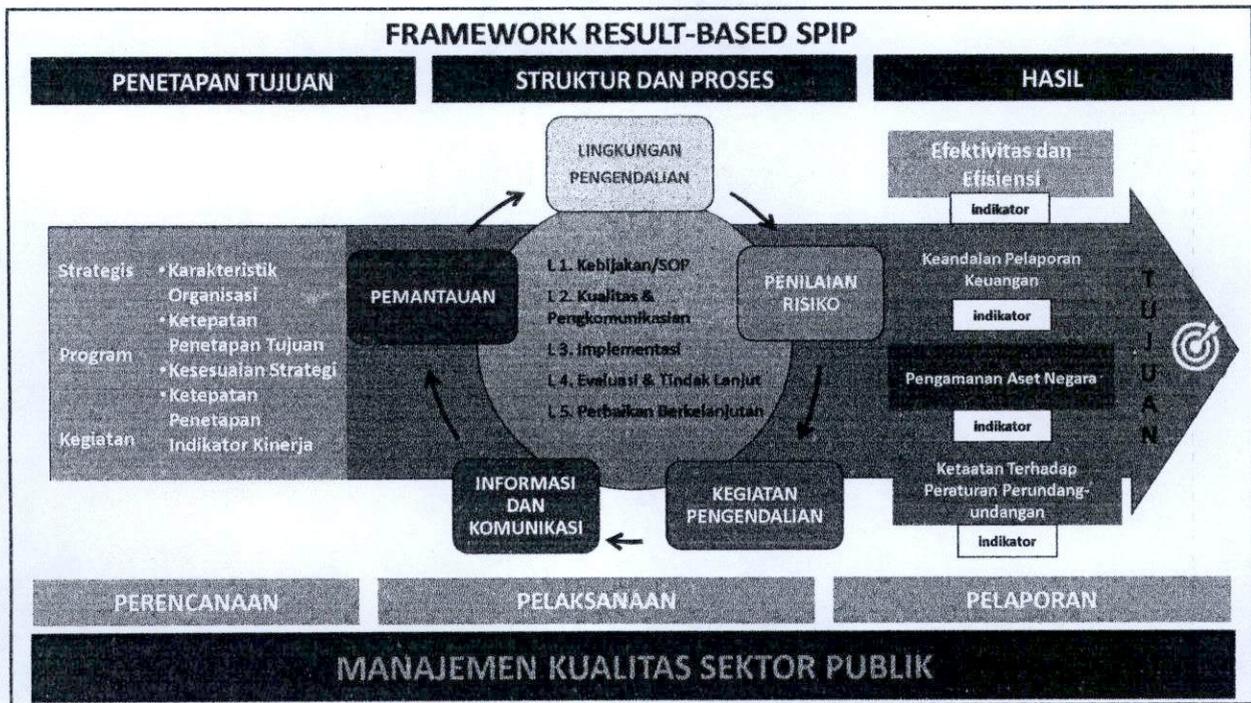
DIPETAKAN KETERKAITAN SUB UNSUR DENGAN 4 TUJUAN SPIP

PENGUKURAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

MENGINTEGRASIKAN PROSES MR DALAM MEMBANGUN SPIP DAN PENGUKURANNYA

PENILAIAN MENGEDEPAKANKAN SUBSTANCE OVER FORM

PENILAIAN DIARAHKAN PADA PERBERIAN REKOMENDASI PERBAIKAN/ Penguatan PENGENDALIAN, TIDAK SEKADAR MEMBERIKAN SKOR



KINERJA VS KERJA



PENERAPAN KINERJA vs KERJA

KINERJA

- Tujuan
- Sasaran
- Outcome
- Hasil
- Kondisi positif yang ingin diwujudkan
- Kondisi Negatif yang ingin dihilangkan



KERJA

- Strategi/cara untuk mencapai kinerja
- Program, Kegiatan, Sub-kegiatan, komponen, dan anggaran

KINERJA

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET

KERJA

KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS

Syarat sasaran strategis yang baik:

1. Berorientasi hasil
2. Menggambarkan mandat dan tugas fungsi
3. Mempertimbangkan Isu Strategis
 - Mengacu pada Visi Misi K/L
 - Mengacu pada RPJMN

MENETAPKAN TARGET

Pertimbangan dalam menetapkan target:

- Target nasional/ Target tingkat yg lebih tinggi
- Trend/ capaian periode sebelumnya
- Standar Nasional
- Ketersediaan sumber daya

INDIKATOR KINERJA

Syarat Indikator kinerja yang baik:

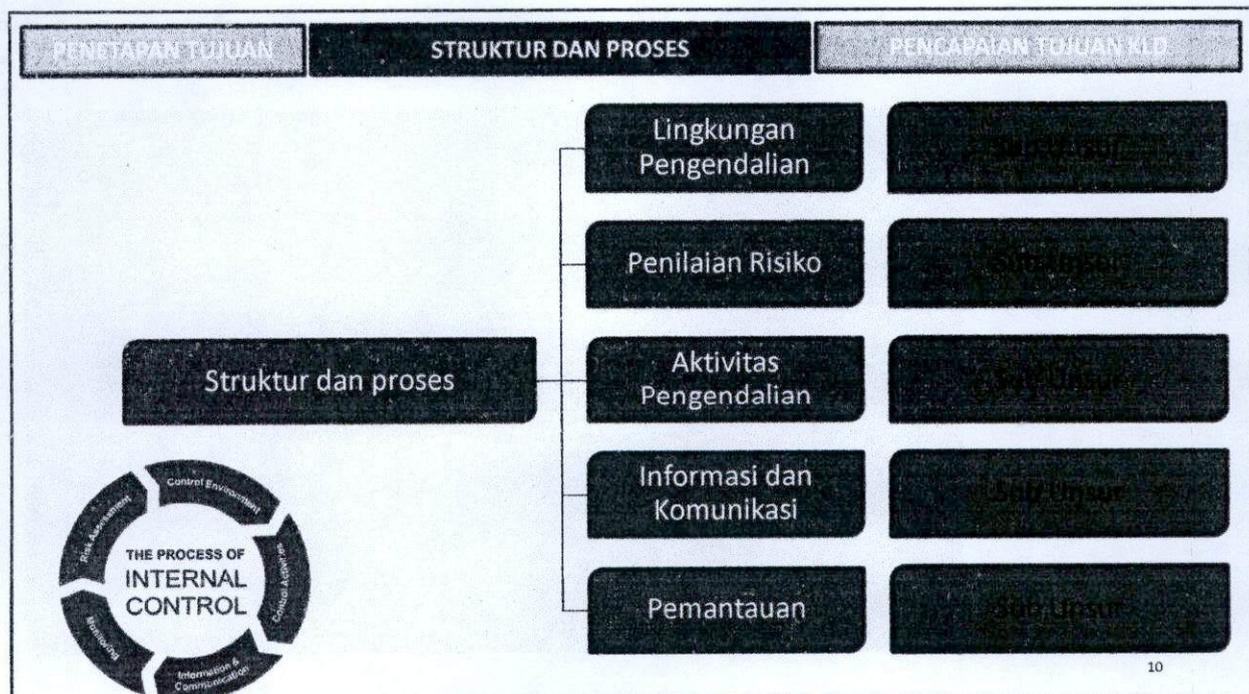
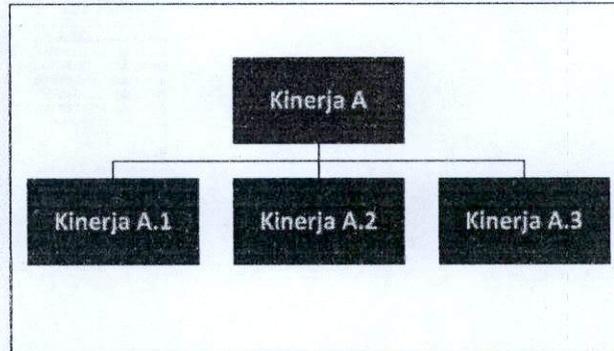
1. Berorientasi Hasil/Outcome
2. SMART
 - Spesifik (Jelas, tidak berdwimakna)
 - Measureable (dapat diukur)
 - Achievable/Attainable (dapat diraih)
 - Relevant (relevan dgn kinerja yang ingin diukur)
 - Time Bound (memiliki batasan waktu pengukuran)

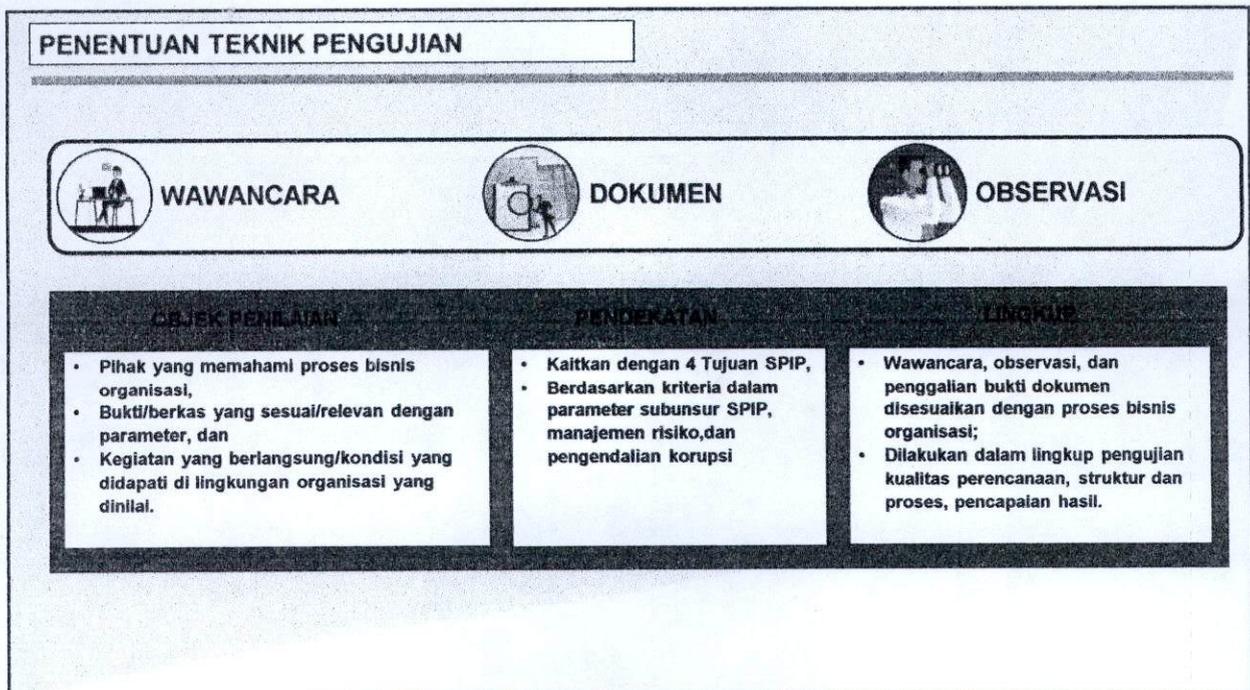
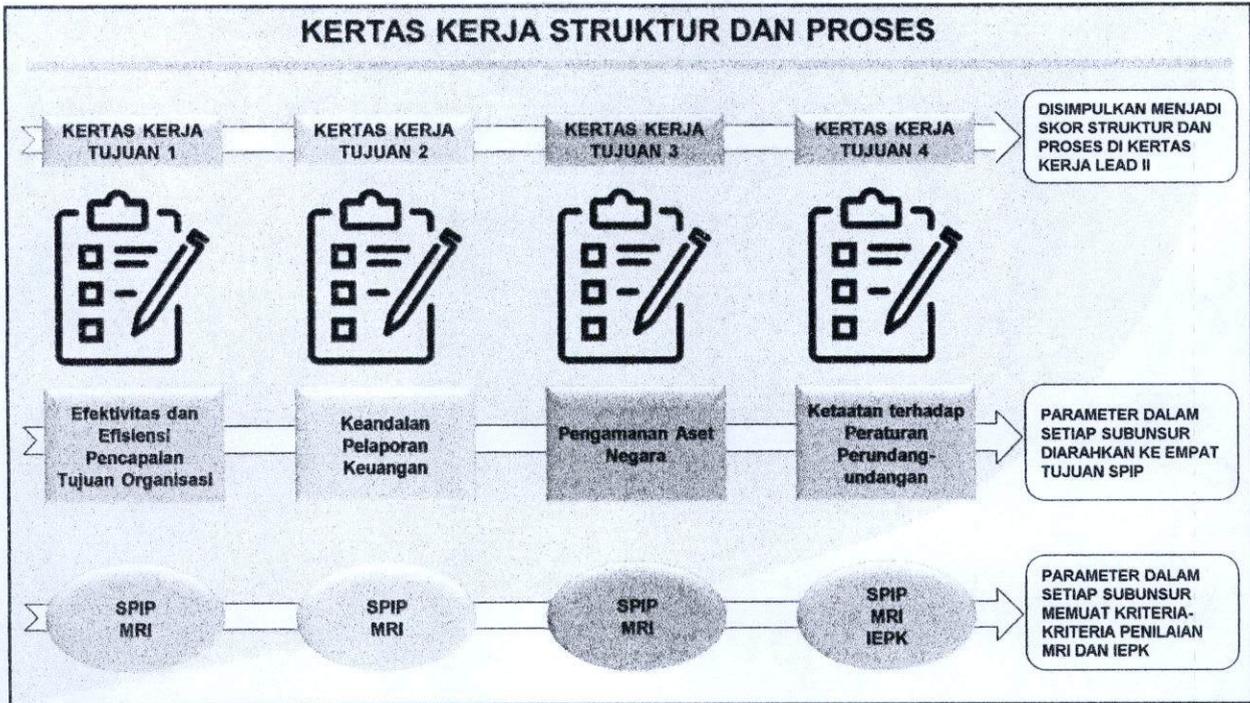
KESIMPULAN

1. Pastikan kalimat tujuan/sasaran jelas, berorientasi hasil
2. Pastikan tujuan/sasaran berorientasi hasil sesuai konteksnya
3. Pastikan indikator SMART dan cukup untuk mengukur sasaran
4. Tetapkan target secara rasional.

CASCADING

- Penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, dengan menggunakan kerangka logis
- Digunakan untuk merumuskan kinerja apa yang harus ditagih di tingkat di bawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang harus dilakukan
- Mengacu pada proses bisnis yang berlaku umum dan ditetapkan

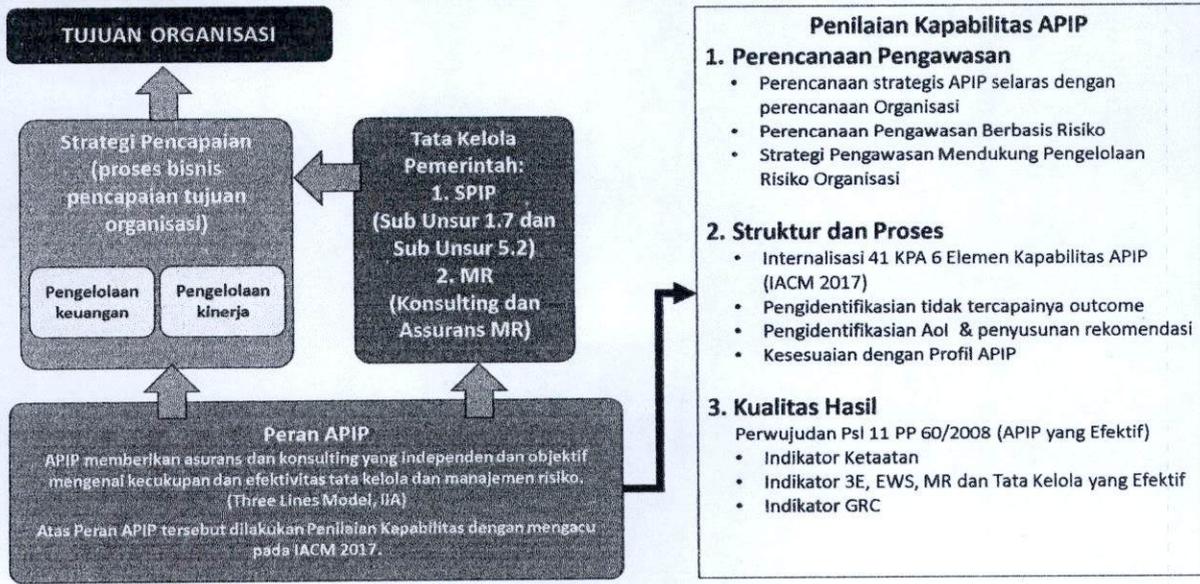


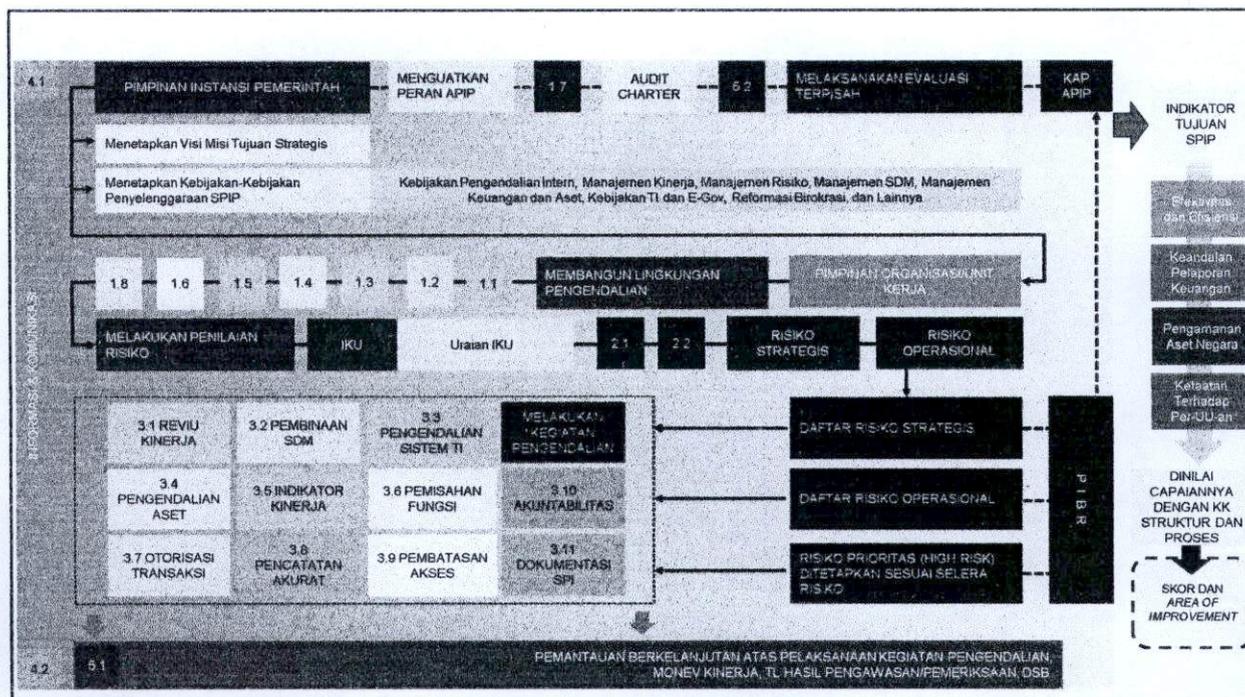


Pengintegrasian Penilaian Kapabilitas APIP dengan Maturitas Penyelenggaraan SPIP



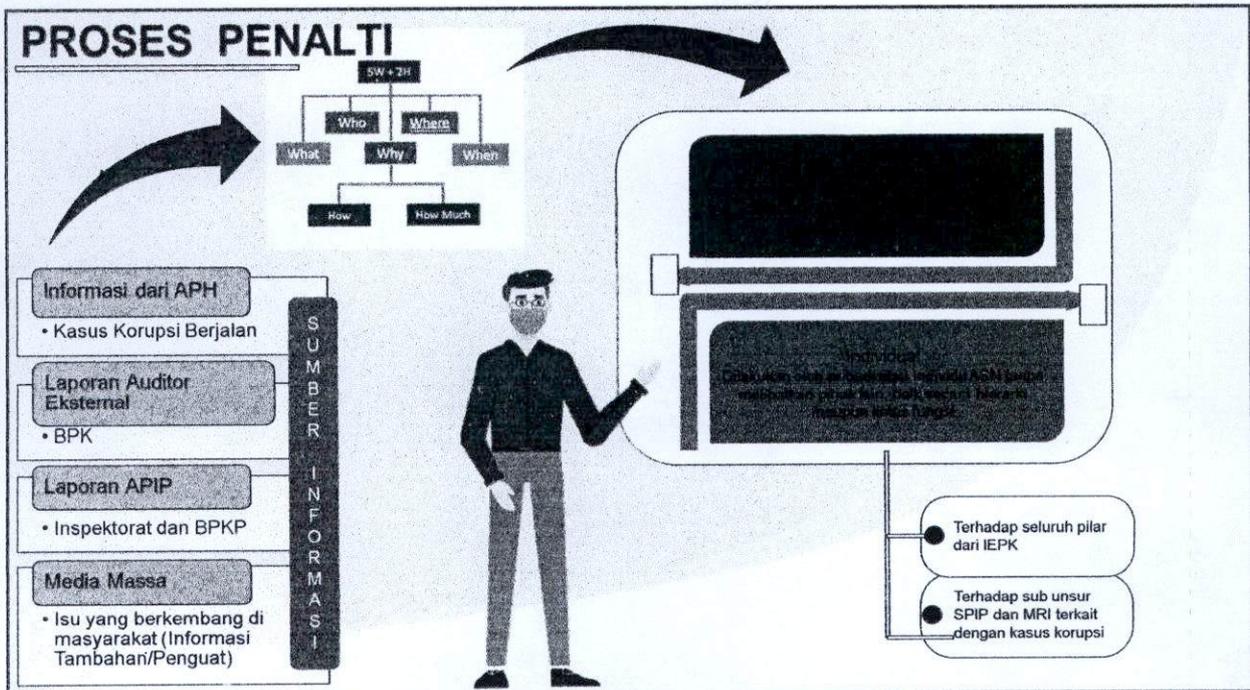
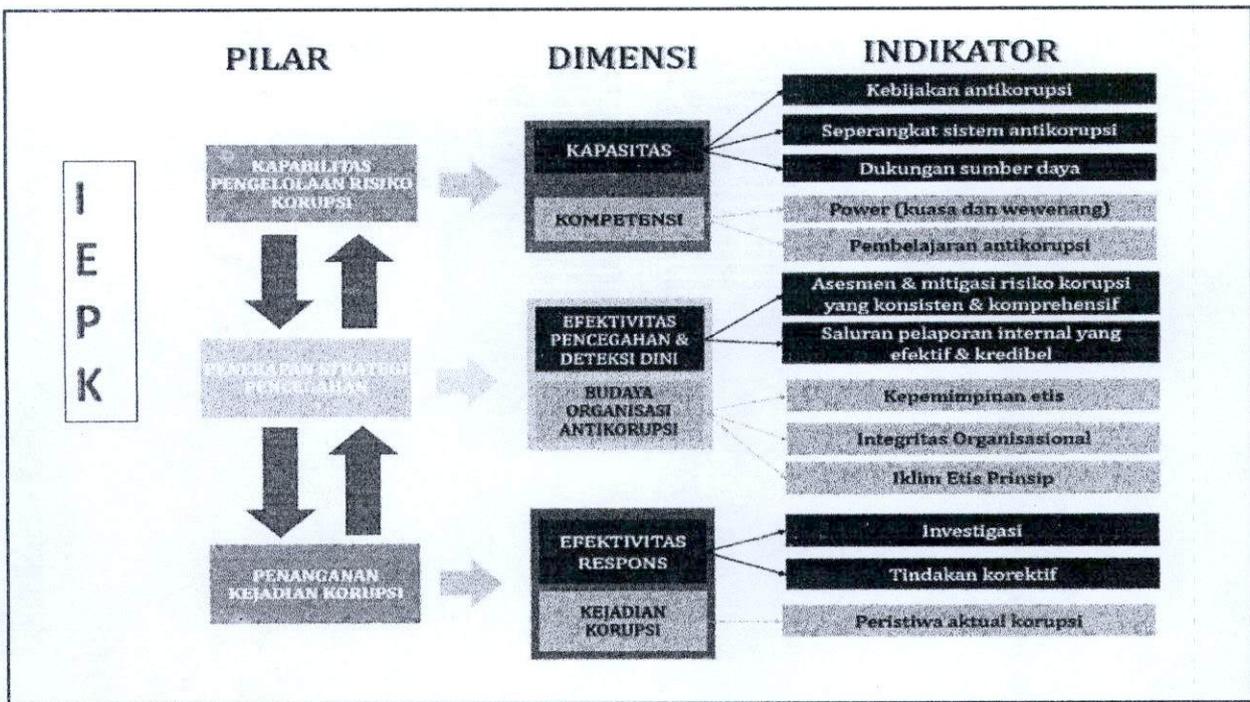
Peran APIP dalam Mendukung SPIP dan MR





Pengintegrasian Penilaian IEPK dengan Maturitas Penyelenggaraan SPIP





METODE PENALTI

Penalti terhadap MRI bergantung pada sub unsur SPIP terkait

Penalti terhadap pilar-pilar IEPK menyesuaikan pada hasil analisis

SUB UNSUR TERKAIT	
1.1	3.4
1.3	3.7
1.5	3.8
1.6	3.9
1.7	3.10
1.8	3.11
2.1	4.1
2.2	5.1
3.2	5.2

SUB UNSUR TERKAIT	
1.1	3.6
1.3	3.7
1.6	3.8
1.8	3.9
2.1	3.11
2.2	4.1
3.2	5.1
3.4	5.2

Penalti dilaksanakan dengan menurunkan gradasi per parameter

Penurunan maksimal adalah sampai dengan kebijakan (Gradasi E) untuk SPIP



Catatan: Tabel di atas dapat digunakan sebagai referensi namun tidak membatasi Tim Penjamin Kualitas dalam menganalisis hubungan kausalitas dan melakukan pengurangan nilai pada sub unsur

PENETAPAN TUJUAN
STRUKTUR DAN PROSES
PENCAPAIAN TUJUAN KLD



Pencapaian Tujuan KLD

- Efektivitas dan Efisiensi

 - Capaian Outcome
 - Capaian Output
- Keandalan Pelaporan Keuangan

 - Opini atas Laporan Keuangan – BPK RI
 - Pemanfaatan LKPP/LKPD Audited
- Pengamanan atas Aset

 - Keamanan Administrasi
 - Keamanan Hukum
 - Keamanan Fisik
- Ketaatan terhadap Peraturan

 - Temuan atas ketidakpatuhan dalam LHP BPK
 - Temuan APIP
 - Kasus Korupsi

20

PENILAIAN ATAS PENCAPAIAN TUJUAN – Alur Penilaian

Penilaian atas Pencapaian Tujuan	Sumber Informasi	Langkah Kerja	Simpulan Penilaian
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan Perkin Kepala K/L/D dan Laporan Kinerja K/L/D Dapatkan Perkin Kepala Satker dan Laporan Kinerja Satker 	<ul style="list-style-type: none"> Hitung rata-rata pencapaian indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis K/L/D. 	Capaian Outcome
		<ul style="list-style-type: none"> Hitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan satuan kerja 	Capaian Output
Keandalan Pelaporan Keuangan	Dapatkan Buku I dan Buku II LHP BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 5 tahun terakhir.	Identifikasi informasi terkait Opini Laporan Keuangan K/L/D dalam 5 tahun terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> Capaian subkomponen Keandalan Pelaporan Keuangan; Subunsur SPIP terkait.
Pengamanan atas Aset	Dapatkan Buku I dan Buku II LHP BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 5 tahun terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi BMN/D dalam 5 tahun terakhir; 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian pengamanan administratif BMN/D; Subunsur SPIP terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan kepemilikan BMN/D dalam 5 tahun terakhir; 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian pengamanan hukum BMN/D; Subunsur SPIP terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> Hitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir. 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian pengamanan fisik BMN/D; Subunsur SPIP terkait.
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Dapatkan Buku III LHP BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 4 tahun terakhir; Dapatkan informasi terkait keterjadian korupsi di K/L/D. 	<ul style="list-style-type: none"> Hitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian ketaatan dalam LHP BPK-RI; Subunsur SPIP terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat eselon II dalam periode yang dinilai dan/atau saat penilaian. 	Veto atas hasil penilaian subunsur terkait



Thank you!

**DIREKTORAT PENGAWASAN
BIDANG HANKAM, BPKP**

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

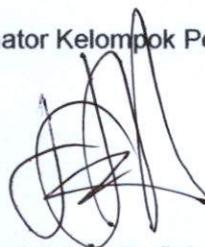
NOTA DINAS

Nomor : ND-298/PI.04.02/2021

Yth. : Kepala Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal
Dari : Koordinator Kelompok Pengawasan Internal
Hal : Penyampaian Notulen Rapat Sosialisasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi TA. 2021
Tanggal : 2⁹ Desember 2021

-
1. Dasar:
 - a. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 - b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
 - c. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-052.01.1.427975/2021 Revisi 07 tanggal 29 November 2021;
 - d. Surat Undangan Nomor 263 /PI.04.02/2021 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Rapat Sosialisasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi TA. 2021.
 2. Sehubungan dengan dasar diatas, kami sampaikan notulen kegiatan Rapat Sosialisasi Rapat Sosialisasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi TA. 2021. (terlampir).
 3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Koordinator Kelompok Pengawasan Internal,



Titin Mardyaningsih, S.E., M.M.
NIP. 19750207 200604 2001

**NOTULEN
RAPAT SOSIALISASI
PENILAIAN MATURITAS W SPIP TERINTEGRASI TA. 2021
DENGAN BPKP**

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Desember 2021
Waktu : 09.00 WIB – 14.30 WIB

1. Tempat

Ruangan Sitroom Gedung B Lantai 5 Setjen Wantannas

2. Narasumber

Henry Marvin (Auditor Madya, Koorwas Bidang Pertahanan)

Edwardzufri (Auditor Muda, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP))

3. Pimpinan

Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I

4. Peserta:

- a. Dra. Sri Rahayu Purwaningtyastuti
- b. Kolonel Laut (KH) Dr. Dwi Ari Purwanto, S.Pd., M.Pd.
- c. Dra. Sri Haryani, M.M.
- d. Titin Mardyaningsih, S.E., M.M
- e. Kolonel Laut (S) Abdul Rozaq, S.T., M.Tr.Hanla., M.M
- f. Tri Hariyadi, S.Sos., M.A.P.,
- g. Yadi Kurniawanto, S.T.
- h. Letkol Arh Abdul Cholik, S.H., M.H.
- i. Nurman Kahar, S.IP., M.A.P.,
- j. Alvin Rayinda Pramasha, S.E.
- k. Dian Ayu Pertiwi, SE
- l. Daniel Maruli Tua Manik, SE
- m. Helfrida Sinaga, S.E.
- n. Riedjanti Restu Biandari, S.E
- o. Maulidya Nurisya, S.E.
- p. Affah Fitriani, S.E.
- q. Andre Pamungkas, S.E.
- r. Guspahri Ardiansyah Hasibuan, A.Md.
- s. Genanto Atmadiredja, S.E.

5. Topik Bahasan

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

6. Pembahasan

- 1) Rapat dihadiri oleh Para Peserta Rapat dan Narasumber dari BPKP yaitu **Bapak Henry Marvin dan Bapak Edwardzufri**;
- 2) Rapat dibuka Oleh **Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I** selaku Pimpinan, pada kesempatan tersebut Bapak Putu Kepala Biro PSP menyampaikan Hasil Penilaian Maturitas SPIP TA. 2020 oleh BPKP, dengan nilai 3,023 Setjen Wantannas masih Level 3 (terdefinisi) dari penilaian maturitas SPIP TA. 2020 yang menjelaskan bahwa praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumetasi memadai.
- 3) **Kabag Pengawasan Internal, Bu Titin, SE, MM** selaku **Koordinator Kelompok Pengawasan Internal** menyampaikan beberapa pembahasan pada Rapat Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Teintegrasi di harapkan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tidak Hanya Fokus pada Penyelenggaraan SPIP tetapi fokus pada Tujuan Organisasi peningkatan, kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi.
- 4) **Henry Marvin (Narasumber BPKP)** menjelaskan bahwa ada 3 Arahan Presiden kepada BPKP adalah
 - a) Meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja Pemerintah.
 - b) Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.
 - c) Meningkatkan pengawalan atas kualitas data yang dikelola oleh Pemerintah

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pengawasan Intern adalah

- a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi;
- b) Memberikan peringatan dini & efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern)

Perbaikan Strategi Pembinaan dan Penilaian Maturitas SPIP dikaitkan secara langsung dengan 4 tujuan SPIP yaitu Pengukuran Efektifitas Pengendalian yang di bangun, mengintegrasikan proses Manajemen Risiko dalam membangun SPIP dan Pengukurannya, penilaian mengedepankan *Substance Over Form*, penilaian diarahkan pada pemberian rekomendasi perbaikan/ penguatan pengendalian, tidak sekedar memberikan skor.

Result Based SPIP dapat dilihat dari tiga bagian yang tidak bisa di pisahkan yaitu Penetapan Tujuan (Perencanaan) , Stuktur dan Proses (Pelaksanaan), Hasil (Pelaporan). Perencanaan dapat dilihat dari strategi, program, dan kegiatan, pelaksanaan dapat dilihat dari 5 unsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan) dan Point Point Penting Setiap Elemen SPIP. Terkait Pelaporan indikatornya adalah Efektifitas dan Efisiensi (Capaian Outcome, Capaian Output), Keandalan pelaporan dan Keuangan (Capaian subkomponen Keandalan Pelaporan Keuangan; Subunsur SPIP terkait), Pengamanan Aset dan Negara (Capaian pengamanan administratif, Hukum, dan fisik BMND; Subunsur SPIP terkait), Ketaatan Terhadap Peraturan dan Undang Undang (Capaian ketaatan dalam LHP BPK-RI).

Penentuan teknik pengujian yaitu Wawancara, Dokumen, Observasi yang dijadikan dasar adalah objek penilaian (Pihak yang memahami proses bisnis organisasi, Bukti/berkas yang sesuai/relevan dengan parameter, dan Kegiatan yang berlangsung/kondisi yang

didapati di lingkungan organisasi yang dinilai), Pendekatan (Kaitkan dengan 4 Tujuan SPIP, Berdasarkan kriteria dalam parameter subunsur SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi), Lingkup (Wawancara, observasi, dan penggalan bukti dokumen disesuaikan dengan proses bisnis organisasi, Dilakukan dalam lingkup pengujian kualitas perencanaan, struktur dan proses, pencapaian hasil). Peran APIP juga mendukung SPIP dan MR sesuai dengan (Three Lines Model, IIA) yaitu memberikan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas tata kelola dan manajemen risiko. Adanya penambahan unsur Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Bapak Edwardzufri (Narasumber BPKP) menjelaskan Pengenalan aplikasi penilaian mandiri SPIP kementerian dan lembaga, User PM dan PK terdiri dari Admin KL, Asesor Instansi, Asesor Unit/ Satker, Tim PK KL, TIM PK Unit / Satker. Siklus penilaiannya adalah

- a. Kedeputian BPKP menambahkan admin KL
- b. Admin KL Membuat Penilaian Mandiri
- c. Admin KL menambah Asesor Instansi, Asesor Unit, Tim PK KL, dan Tim PK Unit berdasarkan surat tugas/SK
- d. Persiapan Penilaian
- e. Penetapan tujuan
- f. Struktur dan proses
- g. Pencapaian tujuan
- i. Kirim hasil penilaian ke Proses PK

Admin K/L Mempersiapkan Penilaian dasar/ penilaian, pegawai / Update data pegawai, tim penjamin kualitas (PK) KL, tim penjamin Kualitas (unit). Asesor unit Input/Import data Penetapan Tujuan Sasaran Strategis KL - Program dan Kegiatan Satker, Input informasi Opini Laporan Keuangan, Penilaian komponen **Penetapan Tujuan** (Sasaran Strategis KL), Penilaian komponen **Pencapaian Tujuan**

- ❖ Tujuan 1 – Asesor Instansi (satker perencanaan u/ bag Sastra KL)
- ❖ Tujuan 2 – Asesor Instansi (satker pengawasan)
- ❖ Tujuan 3 – Asesor Instansi (satker pengawasan)
- ❖ Tujuan 4 – Asesor Instansi (satker pengawasan)

Bertanggung jawab dan mengendalikan PM KL dan bertugas melakukan pengisian/pengumpulan bukti/penyimpulan secara kelembagaan, Submit atas hasil PM. Asesor Unit Penilaian sebagian dari komponen Penetapan Tujuan (**Sasaran Strategis Tingkat Satker**), Penilaian Struktur Proses Bertanggung jawab dan melakukan pengisian/pengumpulan bukti pada unit masing-masing.

Tim PK KL Bertanggungjawab atas simpulan hasil penjaminan kualitas, memberikan saran perbaikan kepada Asesor Instansi dan menjelaskan hasil PM kepada Tim Evaluasi.

Tim PK Unit Bertanggung jawab atas hasil penjaminan kualitas dalam penyimpulan bukti pada unit masing-masing

Diskusi:

- a) Pertanyaan dari Kolonel Laut (S) Abdul Rozaq, S.T., M.Tr.Hanla., M.M (Kabag perencanaan)

Menurut Pak Marvin Untuk Penetapan tujuan faktor faktor/ indikator indikator apa saja yang harus di perhatikan dalam memberikan penilaian terhadap aspek dari perencanaan?

Jawaban: seperti yang di ketahui aspek perencanaan yang perlu menjadi pertimbangan dari kualitas sasaran strategis adalah berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis, indikator kinerja smart, target realistis. Dari aspek perencanaan terintegrasi adalah design dan penerapan. Untuk kualitas program dan kegiatan yaitu keterkaitan dengan sastra dan kualitas indikator.

- b) Pertanyaan Afifah, S.E. (Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja)

Menurut Pak Edo karena Setjen Wantannas hanya satu satker dengan 1 DIPA, dan 1 Renstra apakah ada unsur Penilai mandiri di Unit kedeputian ?

Jawaban: khusus untuk berjalan penilaian Mandiri diusahakan untuk sampai ke level unit terutama unit inti atau unit yang memegang tugas dan fungsi utama Setjen Wantannas yaitu Deputi Sisnas, Deputi Debang, Deputi Polstra dan Deputi Jiandra.

- c) Pertanyaan dari Dian Ayu Pertiwi (Auditor Ahli Pertama)

Menurut pak Marvin Unsur Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah unsur baru dalam penilaian Maturitas SPIP terintegrasi, bagaimana mengukur penilaian ini karena masih baru tahap pengujian

Jawaban: Unsur Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) untuk lebih efektif dapat diukur dari Kasus Korupsi yang di tangani oleh aparat penegak hukum, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan APIP, dan media Masa.

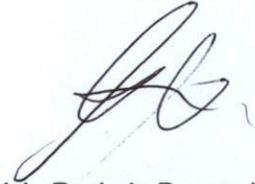
7. Keputusan Pimpinan:

Untuk Pelaksanaan Penilaian SPIP Integratif agar segera melaksanakan dan menyelesaikan Kebutuhan Dokumen dan data data yang terkait. Dan membentuk Tim Tim Penilai Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Setjen Wantannas.

8. Kesimpulan:

Untuk Mencapai Level 4 pada Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi untuk Fokus dalam Tahap Perencanaan, Pelaksanaan Penilaiannya, dan Pelaporannya Untuk Menentukan *Area Of Improvement* (AOI)

Jakarta, 21 Desember 2021
Notulis,



Alvin Rayinda Pramasha
199208242019021002